

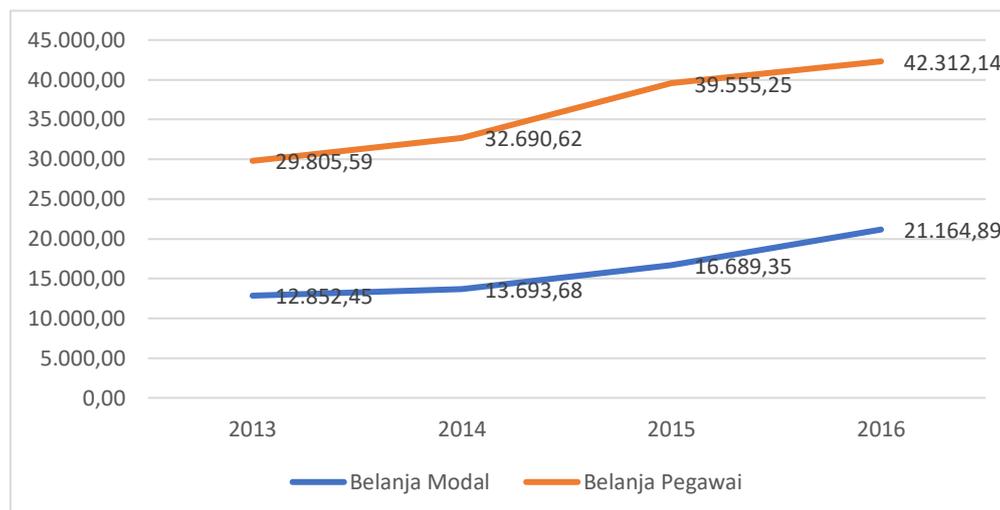
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Setiap provinsi dan daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerahnya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar terwujudnya kesejahteraan Masyarakat (Nurzen & Riharjo, 2016).

Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD bertujuan untuk menambah aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dengan umur manfaatnya lebih dari satu tahun. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melalui investasi pada aset tetap pemerintah daerah, yaitu berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (Suparto LM, 2021).



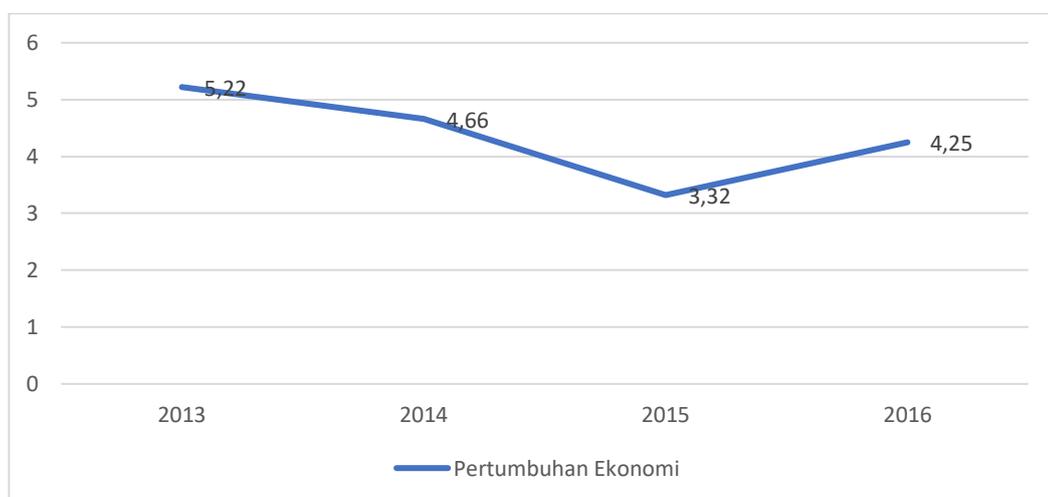
Sumber: Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan (diolah,2024)

Gambar 1. 1
Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Pegawai di Jawa Barat Tahun
2013-2016 (Dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.1 alokasi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai. Alokasi belanja pegawai dari tahun 2013 sampai 2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 42 Miliar, sedangkan alokasi belanja modal dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kemudahan pelaksanaan tugas pemerintah atau untuk peningkatan fasilitas publik terjadi kenaikan namun tidak sebanding dengan belanja pegawai. Selama ini pemanfaatan belanja daerah kurang tepat oleh pemerintah daerah yaitu lebih digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif dibanding untuk belanja modal. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah sebaiknya mengubah komposisi belanjanya. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya melakukan aktivitas Pembangunan.

Salah satu indikatornya yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan dalam pembangunan daerah. Dengan adanya pembangunan daerah dirancang guna dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan masyarakat juga dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya, tidak hanya itu dengan adanya infrastruktur yang memadai juga dapat mendorong investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan bertambahnya pendapatan asli daerah maka dapat berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Maka dari itu akan meningkatkan Belanja Modal.



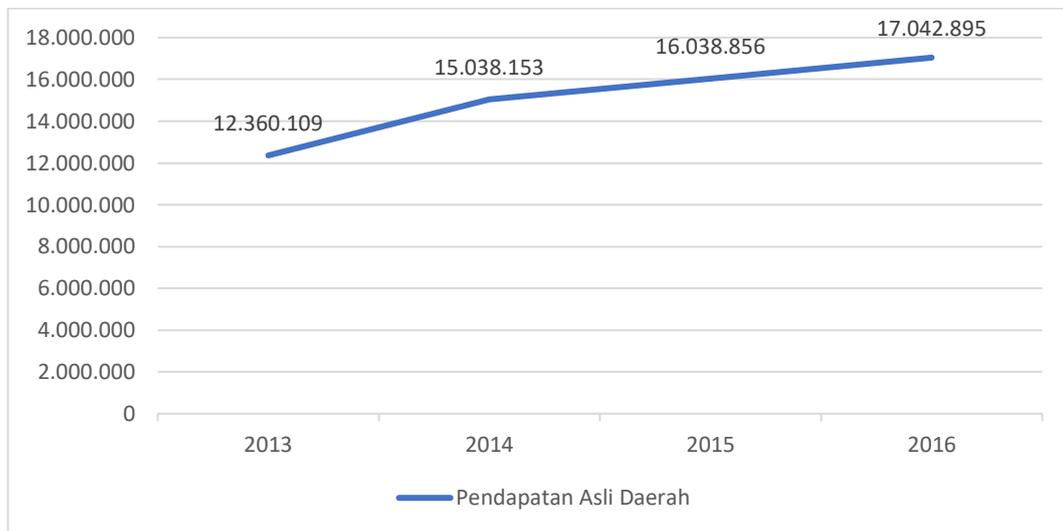
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah,2024)

Gambar 1. 2
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang mengalami perlambatan dari tahun 2013 sampai 2016. Pada tahun 2014 Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 dari 5,22 persen menjadi 4,66 persen penurunan ini tidak lepas karena kinerja sektor pertambangan dan industri yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak terlepas dari kinerja sektor pertanian, pertambangan dan industri. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 salah satu sumber pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundangan-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dengan demikian diharapkan pemerintah dapat menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan didaerahnya. Besarnya PAD menjadi salah satu bagian yang menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Jika dilihat dari sisi sektor pariwisata. Jawa Barat memiliki sumber daya alam dan bangunan bersejarah hal ini bisa menjadi dorongan bagi pemerintah

Jawa barat untuk dijadikan objek pariwisata yang akan mendatangkan sumber pendapatan sehingga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat.



Sumber: Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan (diolah,2024)

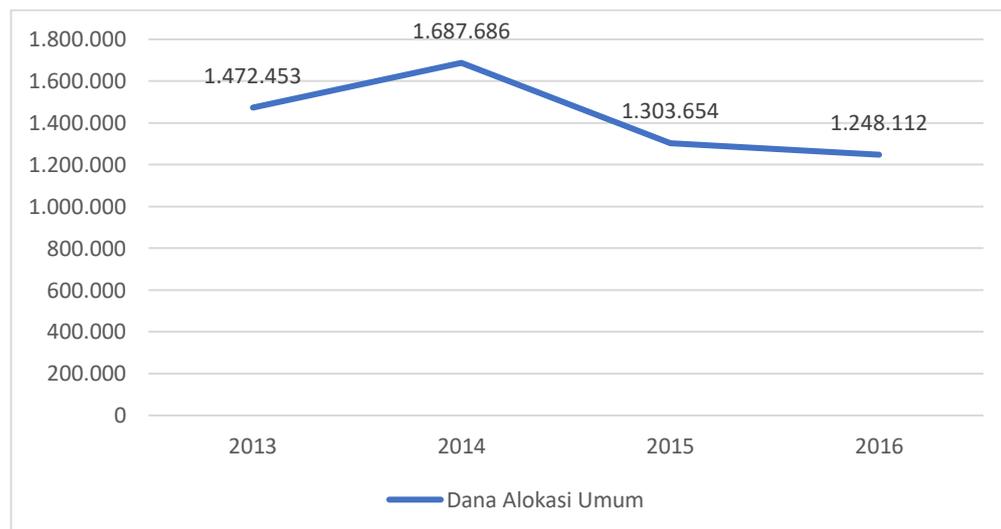
Gambar 1. 3
Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Jawa barat terus meningkat tiap tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat memberikan kontribusi yang optimal. Sehingga meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan meningkatnya PAD maka akan mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingginya PAD diharapkan meningkatkan belanja modal.

Selain itu Dana Alokasi Umum juga dapat membantu meningkatkan Belanja Modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah kepada setiap pemerintah daerah di Indonesia setiap

tahunnya sebagai dana perimbangan. Dana Alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi belanja modal. Dengan adanya tranfer dana dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterimanya untuk mendukung belanja modal dimasing-masing daerahnya. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal yang dipertimbangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (Siregar, 2022).

Berikut adalah Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2016.



Sumber: Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan (diolah,2024)

Gambar 1. 4
Dana Alokasi Umum Jawa Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum Jawa barat terdapat kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun terkait Dana Alokasi Umum.

Dimana kenaikan dan penurunan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya belanja modal. Hal ini dikarenakan dana yang diterima pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yaitu Belanja Modal pun akan mengalami peningkatan dan penurunan. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu menjaga kestabilan Dana Alokasi Umum agar dapat membantu pembiayaan Belanja Modal dengan maksimal agar dapat meningkatkan Pembangunan daerah melalui perolehan aset berupa peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Berdasarkan data-data diatas yang sedang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pengalokasian APBD Kabuptaen/Kota masih belum maksimal dan dinilai masih kurang efektif dan efisien, meskipun terjadi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum tidak diimbangi dengan peningkatan belanja modal, yang terlihat dari kecilnya jumlah anggaran belanja modal dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai. Seharusnya apabila pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum meningkat, maka belanja modal juga meningkat begitu pula sebaliknya,

Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah untuk menyelesaikan kesenjangan pembangunan infrastruktur guna mengembangkan sumber potensi ekonomi di Jawa barat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan terkait dana belanja modal agar dapat menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mempermudah akses perjalanan, membangun ekosistem investasi yang kondusif dan memfasilitasi keterampilan tenaga kerja lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Selain fenomena diatas berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum penelitian Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian A. Surakhman, Abid Djazuli dan Choiriyah (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Penelitian Bambang Suprayinto (2015) dan Mei Indriana Dewi, Nur Fadjrih Asyik (2019) menyatakan Bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang diatas adanya dorongan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen di Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasari oleh belum menemukan penelitian yang sejenis tentang penambahan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan waktu selama 6 tahun dengan menggunakan analisis regresi data panel sehingga hal ini menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bisa lebih memahami teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan yang berkaitan dengan ilmu

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan bisa digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu ekonomi.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik serta permasalahan yang sama ataupun ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam masalah devisa sektor pariwisata, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendapatan asli daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Jawa Barat melalui pengambilan data dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan November 2023 sampai bulan Juli 2024. Untuk rincian pengerjaan terlampir pada lampiran 1